

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Geografi menguraikan tentang litosfer, hidrosfer, antroposfer, dan biosfer. Di dalam lingkup kajian geografi pula kita mengungkapkan gejala – gejala yang ada dipermukaan bumi seperti lapisan ozon, air, udara, manusia dengan segala aktifitasnya, serta hewan dan tumbuhan, mengkaji interaksi dan interelasi, mengkaji persamaan dan perbedaan fenomena geosfer, serta mengkaji pemecahan masalah geografi. Geografi menguraikan permukaan bumi, iklim, penduduk, flora, fauna, serta hasil – hasil yang diperoleh dari bumi. Salah satu prinsip geografi adalah adanya hubungan timbal balik antara gejala – gejala fisik dan sosial di permukaan bumi.

Melihat dari prinsip geografi tentang interaksi, kebutuhan konsumsi minyak kelapa sawit dunia yang sangat tinggi dan terus meningkat akan menyebabkan pertumbuhan produktifitas kelapa sawit yang nantinya berimbas pada kehidupan petani kelapa sawit. Maka dari itu unsur interaksi yang terjadi menyebabkan pembangunan perkebunan kelapa sawit lebih diarahkan oleh pemerintah dalam rangka menciptakan kesempatan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan sebagai sektor penghasil devisa bagi negara. Karena tanaman kelapa sawit menyumbang 33 % minyak nabati dunia. Putra (dalam Goenadi, 2005, hlm.1) mengemukakan bahwa Tanaman ini tidak hanya menghasilkan minyak kelapa sawit tetapi juga terdapat produk turunannya yaitu minyak goreng, deterjen, kosmetik, sabun, dan beberapa produk kimia seperti: *fatty acid*, *fatty alcohol*, *glycerine*, *metalic soap*, *stearic acid*, *methyl ester*, dan *stearin*.

Dalam mengkaji persamaan dan perbedaan geosfer, “ karakteristik suatu wilayah sangat ditentukan oleh perbedaan fenomena tersebut” (Tika,2007,hlm7). Daerah Riau merupakan daerah tropis yang mempunyai banyak hutan hujan yang cocok di alih fungsikan menjadi lahan perkebunan kelapa sawit, selain itu kondisi iklim, hidrologi, dan jenis tanah juga sangat mendukung untuk penanaman kelapa sawit. Maka dari itu Sektor pertanian dikembangkan oleh Pemerintah daerah Riau

khususnya pada subsektor perkebunan sebagai salah satu alternatif pembangunan ekonomi pedesaan. Komoditi yang dikembangkan adalah kelapa sawit sebagai komoditi utama. Beberapa alasan kenapa Pemerintah Daerah Riau mengutamakan kelapa sawit, diantaranya : *Pertama*, dari segi fisik dan lingkungan keadaan daerah Riau memungkinkan bagi pengembangan perkebunan kelapa sawit; *Kedua*, kondisi tanah yang memungkinkan untuk ditanami kelapa sawit menghasilkan produksi lebih tinggi dibandingkan daerah lain; *Ketiga*, dari segi pemasaran hasil produksi daerah Riau mempunyai keuntungan, karena letaknya yang strategis dengan pasar internasional yaitu Singapura; *Keempat*, daerah Riau merupakan daerah pengembangan Indonesia Bagian Barat dengan dibukanya kerjasama *Indonesia Malaysia Singapore Growth Triangle (IMS-GT)* dan *Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle (IMT-GT)*, yang artinya terbuka peluang pasar yang lebih menguntungkan; dan *kelima*, berdasarkan hasil yang telah dicapai menunjukkan bahwa kelapa sawit memberikan pendapatan yang lebih tinggi kepada petani dibandingkan dengan jenis tanaman perkebunan lainnya, seperti yang ditunjukkan oleh table 1.1 dibawah ini.

Tabel 1.1 Pendapatan Petani Perkebunan Tahun 2009 dan 2010 (Dalam Rupiah)

No	Komoditi	2009	2010
1	Kelapa sawit	37.793.685	39.526.001
2	Karet	12.797.010	12.802.263
3	Kelapa	9.502.305	9.665.058
Rata-rata		20.031.000	20.664.441

Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Riau, 2011

Pembangunan perkebunan kelapa sawit mempunyai dampak ganda terhadap sosial ekonomi wilayah, terutama dalam menciptakan kesempatan dan peluang kerja. Pembangunan perkebunan kelapa sawit ini telah memberikan tetesan manfaat (*trickle down effect*), sehingga memperluas daya penyebaran (*power of dispersion*) pada masyarakat sekitarnya. Semakin berkembangnya

perkebunan kelapa sawit, semakin terasa dampaknya terhadap tenaga kerja yang bekerja pada sektor perkebunan dan sektor turunannya.

Salah satu kabupaten di daerah Riau yang mengusahakan komoditi kelapa sawit adalah Kabupaten Pelalawan. Menurut sumber Kajian Inventarisasi Potensi Sumber Daya Alam di Kabupaten Pelalawan Tahun 2009, Kabupaten Pelalawan merupakan salah satu daerah pemekaran di Provinsi Riau tepatnya pemekaran dari Kabupaten Kampar. Terletak di pesisir Timur Pulau Sumatera, dengan wilayah daratan membentang di sepanjang bagian hilir Sungai Kampar, serta berdekatan dengan Selat Malaka yang corak perekonomiannya agraris karena wilayah ini beriklim tropis temperatur rata-rata 22°C – 32°C, kelembaban nisbi 80 - 88%, dan curah hujan rata-rata 2.598 mm/tahun. Sebagian besar daratan wilayah Kabupaten Pelalawan merupakan daratan rendah dan sebagian merupakan daerah perbukitan yang bergelombang sehingga cocok untuk mengembangkan komoditi kelapa sawit.

Berdasarkan lokasi Kabupaten Pelalawan terletak 48 km dari ibukota provinsi. Namun demikian, dihubungkan oleh aksesibilitas yang tinggi, baik melalui jalur darat atau jalur sungai sehingga banyak penduduk pendatang yang tinggal di kabupaten ini. Mereka para pendatang umumnya berasal dari Pulau Jawa dan Sumatera Barat. Kegiatan mata pencaharian para pendatang yang tinggal di Kabupaten Pelalawan sebagian besar sebagai petani kelapa sawit selain ada juga yang berprofesi sebagai pedagang, karyawan, dan pegawai pemerintah.

Perkembangan pada sektor perkebunan kelapa sawit pada mulanya berkaitan dengan program pemerintah yang tercantum dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1986 tentang pengembangan perkebunan dengan pola perusahaan inti rakyat yang dikaitkan dengan program transmigrasi, sebagai berikut:

Menyelenggarakan kerjasama dan koordinasi yang sebaik-baiknya dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan program-program kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan tanaman perkebunan pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR) yang dikaitkan dengan Program Transmigrasi, atau disingkat PIR-Trans.

Kerjasama dan koordinasi yang dimaksud adalah kerjasama dan koordinasi yang dilakukan oleh berbagai macam kementerian yang terkait dalam proyek PIR – Trans ini seperti Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pertanian, Menteri Transmigrasi, Menteri Tenaga Kerja, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Kehutanan, Menteri Koperasi, Menteri Muda Urusan Peningkatan Produksi Tanaman Keras, Gubernur Bank Indonesia, serta Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal yang pada waktu itu menjabat dan melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1986.

Melalui pelaksanaan PIR-Trans petani berhak atas lahan kebun seluas 2 hektar dengan status lahan sertifikat hak milik (SHM). Pendapatan petani peserta program PIR-Trans meningkat setiap bulannya. Biasanya, porsi penggunaan hasil penjualan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit produksi kebun petani plasma adalah: sebesar 30% untuk angsuran kredit, sebesar 20% disisihkan untuk biaya perawatan tanaman, biaya produksi dan biaya perawatan jalan, sedangkan sisanya sebesar 50% menjadi pendapatan bersih petani (Info Sawit,2010,hlm 23). Terdapat tiga unsur dalam pelaksanaan PIR-Trans yang disebutkan dalam Intruksi presiden tersebut, yaitu pemerintah, perusahaan inti, dan petani yang terdiri dari transmigran, penduduk, dan peladang berpindah setempat.

Kecamatan Kerumutan yang merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Pelalawan adalah wilayah pengembangan PIR. Selain itu juga banyak terdapat perkebunan selain perkebunan PIR, yaitu perkebunan pribadi yang diusahakan secara perorangan dengan membuka lahan pribadi. Maka dari itu petani kelapa sawit di Kecamatan Kerumutan dibedakan dalam kategori petani plasma dan petani non plasma.

Petani plasma adalah petani peserta proyek PIR – Trans yang tiap petani mendapatkan kredit dari pemerintah dalam bentuk lahan sebesar 2,00 hektar yang manajemen pengelolaan perkebunannya diatur oleh SOP perusahaan, dan berkewajiban menjual Tandan Buah Segar (TBS) seluruhnya hanya kepada perusahaan inti sebagai perusahaan yang membangun dan mengelola kebun plasma, serta umumnya merupakan peserta Proyek PIR – Trans pada awalnya.

Sedangkan petani non plasma adalah petani diluar petani plasma dan tidak terikat dengan jatah luas lahan karena pada dasarnya petani non plasma membuka lahan perkebunan secara pribadi dengan membuka hutan. Manajemen pengelolaan perkebunan oleh pribadi, sehingga bebas melakukan perawatan dan pemilihan pupuk sesuai keinginan dan kemampuan pribadi, serta bebas memasarkan hasil perkebunan kelapa sawit selain pada perusahaan inti dan umumnya bukan merupakan peserta proyek PIR – Trans.

Terdapat persamaan antara petani plasma dengan petani non plasma dari luas lahan yang relatif sama yaitu seluas 2 hektare, usia tanam yang relatif sama yaitu pada usia produktif, jumlah pohon yang sama dalam satuan lahan yaitu sekitar 240 sampai dengan 255 pohon, serta kemudahan mendapatkan pupuk yang sama pula baik dengan sistem Kredit koperasi maupun membeli secara *cash* di kios, dengan demikian Secara logika seharusnya produktifitas kelapa sawit akan relatif sama, sehingga berpengaruh pada pendapatan yang nantinya akan menciptakan kondisi sosial ekonomi yang tidak akan terdapat perbedaan kondisi antara petani plasma dengan petani non plasma terkait aspek kepemilikan luas lahan, produksi dan produktifitas, budidaya, dan input usaha tani,

Berdasar pada latar belakang masalah, maka perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan kondisi sosial ekonomi antara petani plasma dengan non plasma yang melakukan usaha tani perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Kerumutan dengan topografi dan iklim yang sama. Penelitian ini juga akan memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah setempat dalam mengeluarkan kebijakan, terutama kebijakan dalam bidang perekonomian terhadap masyarakat daerah penelitian.

B. Identifikasi Masalah Penelitian

Melihat dari latar belakang penelitian yang telah penulis kemukakan, penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang timbul di daerah penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Petani plasma dan non plasma akan berpotensi memiliki kesenjangan sosial ekonomi berkaitan dengan hasil usaha tani mereka.

2. Berpotensi terjadinya degradasi lahan gambut yang disebabkan oleh pemanfaatan lahan ke perkebunan kelapa sawit yang dikhawatirkan berdampak besar terhadap kerusakan ekosistem hutan rawa gambut Kerumutan karena beberapa bagian daerah Kerumutan merupakan hamparan lahan gambut.
3. *Illegal logging* yang terjadi akibat pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit.
4. Banyaknya pendatang yang akan masuk ke daerah Kerumutan karena ingin mengusahakan budidaya perkebunan kelapa sawit nantinya akan membuka ruang timbulnya konflik antar budaya penduduk asli dengan pendatang.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pemikiran dari identifikasi masalah yang telah penulis kemukakan, guna memperjelas dan membatasi kajian dalam pembahasannya maka butir - butir permasalahan dirumuskan kedalam bentuk pertanyaan berikut ini :

1. Bagaimana kondisi sosial ekonomi pada petani Plasma?
2. Bagaimana kondisi sosial ekonomi pada petani Non Plasma?
3. Apakah terdapat perbedaan kondisi sosial ekonomi antara petani Plasma dengan Non Plasma?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini secara umum adalah untuk menambah wawasan penulis dan masyarakat tentang suku dan adat istiadat di Kabupaten Pelalawan, namun secara khusus sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi kondisi sosial ekonomi pada petani Plasma.
2. Mengidentifikasi kondisi sosial ekonomi pada petani Non Plasma.
3. Menganalisis perbedaan kondisi sosial ekonomi antara petani Plasma dengan Non Plasma.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini sekiranya dapat bermanfaat luas kedepannya sebagai:

1. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah setempat terkait pengambilan keputusan dalam hal sosial ekonomi masyarakat.

2. Sebagai sumber data bagi peneliti selanjutnya dalam mengkaji masalah tingkat kesejahteraan petani di Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan.
3. Sebagai bahan pengayaan dalam pembelajaran geografi kelas XI SMA pada bab antroposfer, dan untuk pembelajaran yang terkait lainnya.

F. STRUKTUR ORGANISASI SKRIPSI

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab I menguraikan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta struktur organisasi skripsi.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab II menguraikan berbagai teori yang terkait dengan permasalahan yang dibahas, yang meliputi pengertian kelapa sawit, sejarah perkembangan kelapa sawit di Indonesia, Perusahaan Inti rakyat Transmigrasi, parameter sosial ekonomi, petani, indikator kesejahteraan, transmigrasi, serta penelitian yang relevan.

BAB III PROSEDUR PENELITIAN

Pada bab III menjelaskan mengenai banyak hal yang berkaitan dengan kegiatan ataupun proses yang ditempuh dalam suatu penelitian. Kaitannya dengan hal tersebut, pada bab ini meliputi beberapa penjelasan mengenai lokasi penelitian, metode penelitian, variabel penelitian, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab IV membahas mengenai pengolahan atau analisis data untuk menghasilkan penemuan yang berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi petani kelapa sawit di kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab V berupa penyajian dan pemaknaan peneliti terhadap hasil dari analisis penemuan penelitian dan saran yang diberikan dari hasil penelitian.